

**DETERMINAN KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI DIY DAN JAWA TENGAH
MELALUI INTERNET**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nunung Saputra

NIM : 163215791

JURUSAN EKONOMI AKUNTANSI

STIE WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Determinan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY dan Jwa Tengah Melalui Internet**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Muhammad Subkhan, MM selaku Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang telah memberikan izin penyusunan skripsi.
2. Ibu Khoirunisa Cahya Firdarini, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Dra. Priyastiwi, M.Si, Ak. CA sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak dan ibu dosen STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Keluargaku : Istri dan anak-anak, terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta,

2018

Penulis

Nunung Saputra

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

Determinan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet, untuk mengetahui pengaruh kekayaan daerah terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet, untuk mengetahui pengaruh pendapatan per kapita terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet, untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet, dan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta, yaitu pada *website* Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah semua *website* Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah yang berjumlah 40 *website*. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah semua *website* Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yang berjumlah 5 dan Jawa Tengah yang berjumlah 35. Sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 40 *website*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei data pada *website* Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah dan dapat dilengkapi di BPS Provinsi DIY. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet. Hal ini berarti, jika Belanja Daerah mengalami peningkatan, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet juga akan mengalami peningkatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kekayaan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet, hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Per Kapita berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet, hasil analisis menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet, hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet.

Kata kunci: Kualitas Penyajian, *Website*, Laporan Keuangan Pemerintah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pertanyaan Penelitian	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.2. Tinjauan Peneliti Terdahulu	23
2.3. Pengaruh Antar Variabel	26
BAB III. METODE PENELITIAN	34
3.1. Metode Penelitian	34

3.2. Metode Analisis Data.....	38
BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Analisis Data.....	46
4.2. Pengujian Asumsi Klasik	38
4.3. Uji Statistik	52
4.4. Pembahasan.....	57
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Keterbatasan.....	65
5.3. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Prosedur Penarikan Sampel	44
Tabel 4.2. Data dan Sampel Daerah Penelitian.....	45
Tabel 4.3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	46
Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas dengan <i>Kolmogorov Smirnov Test</i>	48
Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinearitas dengan Metode VIF	49
Tabel 4.6. Hasil Uji Autokorelasi	50
Tabel 4.7. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Glejser</i>	51
Tabel 4.8. Hasil Regresi Linier Berganda Metode OLS	52

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian.....	33
--------------------------------------	----

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Data Penelitian

Lampiran 2. Statistik Deskriptif Descriptives

Lampiran 3. Hasil Uji Normalitas

Lampiran 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 5. Hasil Regresi Linier Berganda

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Urusan pemerintahan sebagian dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Urusan pemerintah yang pada saat sebelum reformasi sebagian besar ditangani oleh pemerintah pusat, maka setelah reformasi sebagian besar urusan pemerintah tersebut dilimpahkan ke daerah. Pengalihan ini juga berdampak pada pengalihan anggaran untuk pemenuhan urusan tersebut dari pusat ke daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini diikuti dengan reformasi keuangan. Reformasi keuangan dilakukan pada semua tahapan proses keuangan negara dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan dan audit. Reformasi Keuangan dan Otonomi Daerah telah merubah iklim pelaksanaan pemerintahan daerah. Akuntabilitas dan transparansi mulai diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang mengharuskan informasi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan pemda seharusnya disampaikan kepada publik melalui media sehingga rakyat dapat mengaksesnya (Zulhilmi & Dwi, 2011).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa presiden, gubernur, bupati, dan walikota wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Salah satu tujuan penyediaan informasi dalam laporan keuangan adalah untuk kepentingan transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Dalam konsep pedoman kebijakan *governance* dinyatakan bahwa transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan dan penyediaan informasi menjadi unsur yang penting dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengungkapkan berbagai informasi dalam laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Transparansi informasi pemerintah mulai menjadi perhatian sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Pemerintah daerah yang transparan harus mampu menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pengguna lainnya. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan derajat transparansi dan mengurangi asimetri informasi antara pejabat publik dengan masyarakat adalah melalui pemanfaatan media internet (*e-government*) terkait dengan penyusunan dan penggunaan anggaran atau publikasi laporan keuangan pemda (World Bank, 2003).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi perkembangan perekonomian yang ditandai dengan proses digitalisasi pertukaran informasi melalui berbagai media komunikasi yang memanfaatkan teknologi

informasi. Proses digitalisasi terjadi di semua organisasi disebabkan oleh biaya yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi dalam menyampaikan suatu informasi serta kekuatan dari teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan dan memudahkan tingkat aktivitas entitas ekonomi, yang sebelumnya dilakukan dengan manual dan konvensional. Terkait dengan pemanfaatan fasilitas internet (*website*) oleh pemda di Indonesia, saat ini sebagian besar pemda telah memiliki *website* resmi. *Website* tersebut digunakan untuk memberikan informasi umum tentang daerah, informasi kegiatan pelayanan masyarakat, sosialisasi peraturan, dan sarana berkomunikasi interaktif dengan masyarakat (Bonson & Escobar, 2005).

Publikasi laporan keuangan melalui internet (*website*) merupakan salah satu bentuk pengungkapan secara sukarela (*voluntary disclosure*) dan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan derajat transparansi. Penggunaan internet (*website*) membuat publikasi laporan keuangan menjadi lebih cepat dan mudah, sehingga dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun (Scott, 2009). Namun penelitian Muhammad (Rahman dkk., 2013) menunjukkan bahwa *website* pemda belum digunakan secara optimal dalam mengembangkan pelaporan keuangan. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pemda terbukti lebih rendah dari rata-rata indeks pengungkapan informasi non keuangan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tahun 2010 dinyatakan bahwa tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna untuk membantu pengambilan keputusan. Pentingnya mengungkapkan semua informasi bertujuan agar

menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan. Dengan demikian akan memperjelas bahwa laporan keuangan yang disajikan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan atas peraturan yang ada, tetapi harus memenuhi pengungkapan yang akan memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahaminya.

Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah melalui media internet (*website*), di antaranya, belanja daerah, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, *leverage*, Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tingginya belanja daerah, pemerintah daerah seharusnya memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat (Ratmono, 2013). Semakin tinggi kekayaan daerah semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan (Hudoyo & Mahmud, 2012; Afryansyah & Haryanto, 2011). Hal ini dimaksudkan dengan kekayaan yang tinggi pemerintah akan cenderung ingin memperlihatkan atau menginformasikannya. Semakin tingginya pendapatan per kapita tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam *website* pemerintah daerah maka dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat setempat. Dengan pendapatan per kapita yang tinggi, maka masyarakat lebih memanfaatkan teknologi sehingga kemungkinan pemerintah daerah lebih transparansi dalam melaporkan keuangan.

Leverage mengindikasikan sejauh mana pemda menggunakan dana yang dipinjam untuk membiayai aset yang dimiliki (Sinaga & Prabowo, 2011). Kreditor akan selalu mengawasi kinerja pemda dalam menggunakan dana yang dipinjam dan menilai kemampuan pemda dalam melunasi kewajibannya. *Leverage* yang tinggi membuat pengawasan dan informasi yang dibutuhkan oleh kreditor semakin besar, sehingga pemda menanggung biaya yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan

pengawasan oleh kreditor. Internet merupakan media yang paling *cost effective* bagi Pemda dalam mempublikasikan informasi keuangannya. Melalui publikasi laporan keuangan di internet, pemda dapat memberikan informasi pemerintahan secara lebih rinci dengan biaya yang ringan, sehingga dapat memfasilitasi kreditor dalam mengawasi kinerja pemda (Trisnawati & Komarudin, 2014). Semakin tingginya *leverage* tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam *website* pemerintah daerah semakin menurun. Hal ini berarti bahwa pemerintah membatasi informasi mengenai modal yang didapat dengan maksud ingin membuat masyarakat lebih mandiri. Semakin tingginya pendapatan asli daerah akan meningkatkan tingkat pengungkapan dan kualitas informasi pada *website* pemerintah daerah (Puspita & Dwi, 2012). Hal ini dimaksudkan bahwa semakin tingginya pendapatan asli daerah membuat pemerintah ingin memberikan informasi tersebut kepada masyarakat, karena tingginya pendapatan asli daerah menunjukkan kinerja pemerintahan.

Berdasarkan masalah ini, maka penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet dengan judul **"Determinan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet"**.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Rumusan pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet?

2. Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet?
3. Apakah pendapatan per kapita berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet.
2. Untuk mengetahui pengaruh kekayaan daerah terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan per kapita terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian diharapkan dapat mendapatkan pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis di dunia keuangan yang nyata.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah

Penelitian dapat dijadikan sumber informasi untuk bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah untuk meningkatkan transparansi publik dengan meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *webiste* (internet) pemerintah daerah kabupaten di Provinsi DIY.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi untuk dijadikan bahan referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: (a) Pemerintah Pusat, (b) Pemerintah Daerah, (c) Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.
2. Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Sehingga unsur-unsur yang harus dimiliki neraca adalah aset, kewajiban dan ekuitas dana.
3. Laporan Arus Kas. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventarisasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

4. Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelola Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara lebih lanjut memperjelas bahwa Laporan Keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta pengelola bendahara umum daerah.

2.1.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) opini kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opini*). Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*). Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini tidak wajar (*Adversed Opinion*). Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*). Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang

menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: (a) Pemerintah Pusat, (b) Pemerintah Daerah, (c) Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut perundangundangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2.1.3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Khasanah, 2014). Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca (N), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010).

Menurut Rini Laporan Keuangan Pemda merupakan, laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan Laporan Keuangan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan Keuangan Pemda Ini dibuat setiap smesteran/tahunan dan merupakan prtanggungjawaban pelaksanaan pengelolaa keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut. Langkah untuk bisa menyusun laporan keuangan Pemda, terlebih dahulu disusun laporan keuangan Satuan Kerja secara terpisah, juga PPKD menyusun laporan keuangan sebagai PPKD/BUD. Pada saat akan disusun laporan keuangan

pemda maka laporan keuangan SKPD dan PPKD digabungkan untuk menjadi laporan keuangan tingkat Pemda. Format laporan keuangan PPKD sama dengan laporan keuangan SKPKD. Yang berbeda dari kedua laporan keuangan tersebut adalah cakupan transaksi dan akun yang digunakannya.

Adapun komponen laporan keuangan yang disusun oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- b. Neraca,
- c. Laporan arus kas, dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.

Komponen laporan Keuangan di tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terdiri atas:

- a. Laporan realisasi anggaran,
- b. Neraca, dan
- c. Catatan atas laporan keuangan.

2.1.4. Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.4.1. Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, fungsi laporan keuangan sebagai berikut: Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan,

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
- b. Manajemen
- c. Transparansi
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
- e. Evaluasi Kinerja

Fungsi laporan keuangan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen. Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*). Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e. Evaluasi Kinerja. Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.1.4.2. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, tujuan laporan keuangan sebagai berikut: Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.1.5. Determinan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah

1. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam satu periode anggaran. Belanja pemerintah daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam:

- a. Belanja Operasi yaitu belanja operasi merupakan jenis belanja yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik,
- b. Belanja Modal yaitu jenis belanja ini merupakan belanja yang manfaatnya dapat diperoleh lebih dari satu tahun dan dilakukan untuk menambah aset atau kekayaan daerah, yang mana dari aset atau kekayaan tersebut akan menimbulkan belanja lainnya, dan
- c. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan. Bagian yang termasuk dalam jenis pendapatan ini yaitu deviden atau bagian laba yang diperoleh oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi Pemerintah daerah.

- d. Belanja tak terduga yaitu belanja tidak tersangka adalah belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.

2. Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah adalah sumber daya yang mendukung dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kekayaan yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan. Tingkat kemakmuran suatu daerah dapat tergambarkan dari kekayaan daerah tersebut (Sinaga, 2011). Kekayaan daerah yang tinggi merupakan indikator kesuksesan suatu pemerintahan dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya, serta kesuksesan dalam hal mengelola keuangan. Hal inilah yang mendorong masyarakat selaku prinsipal menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menuntut transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dan memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat. Melalui publikasi laporan keuangan, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi keuangan secara lebih lengkap dengan biaya yang murah sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kekayaan daerah dapat menjadi salah satu daya tarik bagi investor yang akan berinvestasi di daerah tersebut karena mampu memakmurkan daerahnya secara mandiri sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kelangsungan usahanya. Pengaruh ini juga akan bersimultan dengan pendapatan

masyarakat di daerah tersebut sehingga makin menggeliatkan perekonomian daerah tersebut.

3. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang ditunjukkan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian) (Todaro, 2003). Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, yang pada akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan daerah sektor pariwisata.

Produk Domestik Regional Bruto adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk warga negara dalam negeri yang ada di wilayah suatu daerah. Data agregat PDRB disajikan atas dasar harga konstan suatu tahun dasar dan atas harga berlaku. Pada penyajian atas dasar harga konstan, semua agregat dinilai atas harga tetap yang terjadi pada tahun dasar, sehingga perkembangan agregat pendapatan semata-mata disebabkan oleh perkembangan riilnya, bukan oleh kenaikan harga. Pada penyajian atas harga berlaku, semua agregat dinilai atas dasar harga pada tahun yang bersangkutan, baik pada saat

menilai produksi dan biaya maupun komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran PDRB (Todaro, 2003).

4. Leverage

Leverage dilihat dari sisi pemerintah merupakan tambahan dana baru, sehingga dapat membantu perkembangan daerahnya dan dapat mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat. *Leverage* berhubungan dengan aktiva atau dana dimana pengguna aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap atau beban tetap. Didalam sektor publik, rasio utang atau *leverage* sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya dan untuk bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Teori *Agency* memprediksi bahwa pemerintah daerah dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi. *Leverage* atau pinjaman dari luar dilihat dari sisi pemerintah merupakan tambahan dana baru.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diusahakan untuk membiayai pengeluaran daerah adalah PAD, dimana potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri dari

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar, 2008). Definisi dari PAD adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan penerimaan lainnya yang sah (Halim, 2006). Menurut Djaenuri (2012) PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Djaenuri, 2012).

Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik. Dalam perspektif otonomi daerah ini menjadi sumber keuangan yang paling utama, selain jenis-jenis penerimaan daerah lainnya yang merupakan penjabaran dari UU No. 25 Tahun 1999. Besar kecilnya PAD akan sangat menentukan kemampuan daerah untuk membiayai segala urusan rumah tangga dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang direncanakan setiap tahun (Djaenuri, 2012).

Komponen-komponen Pendapatan Daerah adalah (Djaenuri, 2012; Bastian, 2006):

- a) Hasil pajak daerah. jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sedangkan jenis pajak daerah untuk kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C.

- b) Hasil retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada tiga golongan retribusi daerah yaitu: untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana/fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan. Yang termasuk dalam jenis pendapatan ini yaitu deviden atau bagian laba yang diperoleh oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi Pemerintah daerah (Bastian, 2006).
- d) Lain-lain PAD yang sah. Komponen yang tergolong dalam jenis pendapatan ini antara lain pendapatan bunga deposito, jasa giro, hasil penjualan surat berharga investasi, pendapatan dari ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah, denda, penggantian biaya, dan lain-lain.

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Rosita & Johan (2017) yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja daerah, umur administratif, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, *leverage* dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *webiste* pemerintah daerah. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan 156 pemerintah daerah di Indonesia tahun 2014. Laporan keuangan diperoleh langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Metode

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah dan umur administratif terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan sedangkan kekayaan daerah, pendapatan per kapita dan pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh positif signifikan dan *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Dari hasil tersebut pemerintah daerah diharapkan lebih mempertimbangkan dalam membuat aturan tingkat internal maupun eksternal agar kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Penelitian yang dilakukan Istikomah & Kurniawati (2016) yang bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage*, kekayaan pemerintah daerah, opini auditor, dan rasio tingkat ketergantungan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 90 laporan keuangan pemda yang di dapat melalui teknik *purposive sampling*. Teknik analisis menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet, rasio tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Penelitian ini hanya terbatas pada pemerintah daerah di Pulau Jawa, sehingga untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode penelitian dan memperluas populasi penelitian. Serta menambah variabel penelitian yang mempengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet misalnya jumlah penduduk dan jumlah SKPD.

Penelitian yang dilakukan Setyowati (2016) yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 314 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2014 dengan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD sebesar 64%. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kekayaan pemerintah daerah dan pembangunan manusia memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan aset pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif. Diferensiasi fungsional, *debt*, dan *intergovernmental revenue* pemerintah daerah terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan Prabowo (2016) yang berfokus pada penerapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui *website* resmi pemerintah daerah (IFLGR) dan faktor-faktor yang mempengaruhi setelah muncul undang-undang keterbukaan informasi publik dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SJ tahun 2012, di mana kesemuanya merupakan upaya perwujudan *Good Government*. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang menerbitkan transparansi anggaran pada *website* resmi mereka. Faktor-faktor (variabel independen) yang dipilih adalah kompetisi politik, kekayaan daerah, *leverage*, tingkat kemandirian, tingkat PDRB, dan opini BPK. Alat analisis yang digunakan adalah *regresi binary logistik* dengan alfa 5%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kemandirian berpengaruh dalam penerapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui *website* (internet) resmi pemerintah daerah (IFLGR), sedangkan yang lain tidak berpengaruh.

2.3. Pengaruh antar Variabel

Dalam penelitian ini, penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah melalui internet dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; belanja daerah, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, *leverage*, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini adalah penjelasan hubungan keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen.

2.3.1. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet

Menurut Undang-Undang No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah terbagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja daerah, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah (Pratama dkk., 2015). Pengadaan infrastruktur atau sarana prasarana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tiap tahunnya, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tingginya belanja daerah, pemerintah daerah seharusnya memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas

kepada masyarakat (Puspita & Dwi, 2012; Ratmono, 2013). Berdasarkan uraian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁: Belanja daerah berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet.

2.3.2. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet

Tingkat kemakmuran suatu daerah dapat tergambarkan dari kekayaan daerah tersebut. Kekayaan daerah yang tinggi merupakan indikator kesuksesan suatu pemerintahan dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya, serta kesuksesan dalam hal mengelola keuangan. Kekayaan daerah adalah sumber daya yang mendukung dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kekayaan yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan. Hal inilah yang mendorong masyarakat selaku prinsipal menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menuntut transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dan memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat. Melalui publikasi laporan keuangan, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi keuangan secara lebih lengkap dengan biaya yang murah sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat (Sinaga, 2011).

Pemerintah daerah yang mempunyai kekayaan yang besar akan menunjukkan kinerjanya yang baik atas pengelolaan sumberdaya dan potensi daerahnya, serta semakin banyak informasi yang harus diungkapkan atas pertanggungjawaban kekayaan daerahnya yang besar. Oleh karena itu, Pemda akan semakin banyak

mempublikasikan laporan keuangannya di internet. Kekayaan daerah dapat menjadi salah satu daya tarik bagi investor yang akan berinvestasi di daerah tersebut karena mampu memakmurkan daerahnya secara mandiri sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kelangsungan usahanya. Pengaruh ini juga akan bersimultan dengan pendapatan masyarakat di daerah tersebut sehingga makin menggeliatkan perekonomian daerah tersebut. Semakin tinggi kekayaan daerah semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan (Afryansyah & Haryanto, 2011). Hal ini dimaksudkan dengan kekayaan yang tinggi pemerintah akan cenderung ingin memperlihatkan atau menginformasikannya. Rahman dkk., (2013) membuktikan kekayaan pmda berpengaruh positif terhadap publikasi LKPD melalui internet. Kekayaan pemerintah merupakan bukti nyata atas kinerja pemerintah daerah yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Sehingga semakin besar rasio pengelolaan belanja pemerintah daerah, maka kecenderungan pemerintah daerah untuk melaporkan keuangannya di internet pun juga semakin tinggi, dan juga sebaliknya. Berdasarkan uraian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Kekayaan daerah berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet.

2.3.3. Pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu daerah. Banyak sedikitnya jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah pendapatan per kapita suatu daerah. Level ekonomi dalam masyarakat daerah dapat mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan oleh pemerintah daerah. Perekonomian masyarakat setempat dapat mempengaruhi pendapatan per kapita

masyarakat dan juga dapat mempengaruhi teknologi yang diadaptasi oleh masyarakat tersebut. Perkembangan teknologi informasi pun semakin pesat, sehingga mendorong pemerintah ikut berperan aktif dalam teknologi tersebut salah satu contohnya yaitu dengan pelaporan keuangan daerah melalui internet. Pemerintah daerah (agen) harus menyesuaikan perkembangan teknologi yang terjadi di lingkungan masyarakat (prinsipal). Oleh karena penggunaan Internet yang sangat besar kemungkinan besar pemerintah daerah akan melaporkan keuangan daerah melalui *website* pemerintah setempat sehingga transparansi laporan keuangan dapat diketahui oleh masyarakat. Semakin tingginya pendapatan per kapita tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam *website* pemerintah daerah maka dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat setempat (Hudoyo & Mahmud, 2014). Dengan pendapatan per kapita yang tinggi, maka masyarakat lebih memanfaatkan teknologi sehingga kemungkinan pemerintah daerah lebih transparansi dalam melaporkan keuangan. Berdasarkan uraian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Pendapatan per kapita berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet.

2.3.4. Pengaruh *Leverage* terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet

Leverage dilihat dari sisi pemerintah merupakan tambahan dana baru, sehingga dapat membantu perkembangan daerahnya dan dapat mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat. *Leverage* berhubungan dengan aktiva atau dana dimana pengguna aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap atau beban tetap. Didalam sektor publik, rasio utang atau *leverage* sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian

kredit. Rasio ini digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya dan untuk bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Teori *Agency* memprediksi bahwa pemerintah daerah dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi. *Leverage* atau pinjaman dari luar dilihat dari sisi pemerintah merupakan tambahan dana baru. Tuntutan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam pemerintahan menjadikan pemerintah daerah lebih terbuka dengan pelaporan.

Leverage mengindikasikan sejauh mana pemda menggunakan dana yang dipinjam untuk membiayai aset yang dimiliki. Kreditor akan selalu mengawasi kinerja pemda dalam menggunakan dana yang dipinjam dan menilai kemampuan pemda dalam melunasi kewajibannya. *Leverage* yang tinggi membuat pengawasan dan informasi yang dibutuhkan oleh kreditor semakin besar, sehingga pemda menanggung biaya yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan pengawasan oleh kreditor. Internet merupakan media yang paling *cost effective* bagi Pemda dalam mempublikasikan informasi keuangannya. Melalui publikasi laporan keuangan di internet, pemda dapat memberikan informasi pemerintahan secara lebih rinci dengan biaya yang ringan, sehingga dapat memfasilitasi kreditor dalam mengawasi kinerja pemda (Trisnawati & Komarudin, 2014). Semakin tingginya *leverage* tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam *website* pemerintah daerah semakin menurun. Hal ini berarti bahwa pemerintah membatasi informasi mengenai modal yang didapat dengan maksud ingin membuat masyarakat lebih mandiri. Berdasarkan uraian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: *Leverage* berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet.

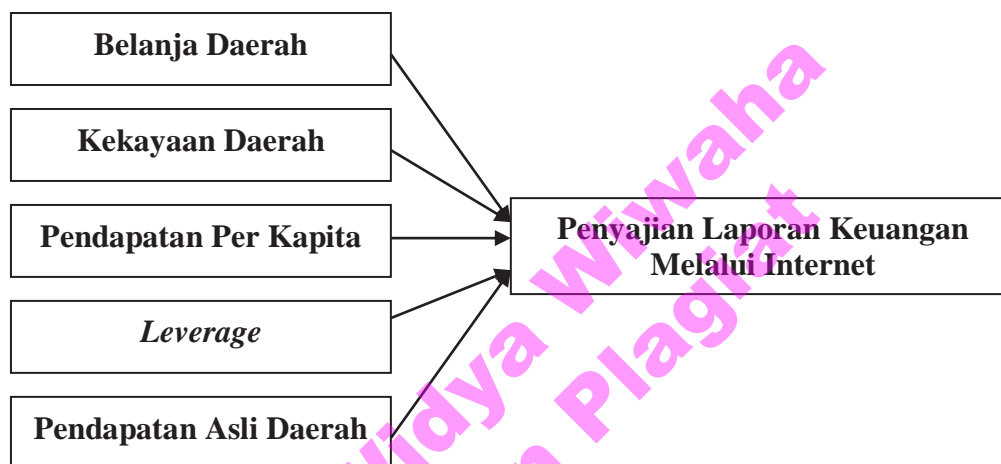
2.3.5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah merupakan (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Mahsun, 2007). Pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi akan menunjukkan kepada para *stakeholders*-nya bahwa pemerintah daerah telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Bila disesuaikan dengan hubungan kontraktual antara agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat) dalam konteks pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah yang ditunjang sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tingginya pendapatan asli daerah akan meningkatkan tingkat pengungkapan dan kualitas informasi pada *website* pemerintah daerah (Puspita & Dwi, 2012). Hal ini dimaksudkan bahwa semakin tingginya pendapatan asli daerah membuat pemerintah ingin memberikan informasi tersebut

kepada masyarakat, karena tingginya pendapatan asli daerah menunjukkan kinerja pemerintahan. Berdasarkan uraian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₅: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet.

2.4. Kerangka Penelitian



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Sumber: Rosita & Johan (2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta, yaitu pada *website* Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah.

3.1.2. Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua *website* Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah yang berjumlah 40 *website*. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah semua *website* Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yang berjumlah 5 dan Jawa Tengah yang berjumlah 35. Sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 40 *website*.

3.1.3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.1.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder ini berupa data mengenai belanja daerah, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, *leverage*, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah melalui internet.

3.1.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei data pada *website* Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah dan dapat dilengkapi di BPS Provinsi DIY.

3.1.4. Definisi Operasional Variabel

3.1.4.1. Penyajian Laporan Keuangan Melalui Internet

Penyajian laporan keuangan melalui internet adalah kualitas informasi dan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan pemerintah daerah melalui *website* yang merupakan salah satu bentuk layanan yang disediakan pemerintah daerah dengan menggunakan bantuan internet (PP No.6 Tahun 2008, PP No.3 Tahun 2007 dan Permendagri No. 7A Tahun 2007). Data penyajian laporan keuangan melalui internet adalah data tahun 2017 dalam satuan *dummy* yang kemudian dijumlahkan menjadi skor total dan dikalikan 100%. Variabel ini diukur dengan menghitung daftar *scoring indeks* pengungkapan sukarela pada *website* pemerintahan daerah.

Indeks konten merupakan indeks yang mengukur informasi-informasi yang diungkapkan pemerintahan daerah pada *website* pemerintah daerah yang terbagi menjadi 10 sub-indeks. Item 10 sub-indeks *website* pemerintah daerah yaitu;

1. Pembangunan,
2. Profil daerah,
3. Pelayanan daerah,
4. Tokoh daerah,
5. Pariwisata,
6. Kependudukan,
7. Keuangan,
8. Presentasi,

9. Detail informasi kontak, dan

10. *Timeliness*.

Delapan (8) item merupakan olahan item apa saja yang paling umum ada pada *website* pemerintahan daerah, sedangkan detail informasi kontak dan *timeliness* merupakan sub-indeks olahan dari penelitian Marston & Polei (2005). Indeks presentasi merupakan representasi dari navigasi, *tools* internet, kualitas dan fitur yang dimiliki oleh *website*. Indeks presentasi terdiri dari dua sub-indeks, yaitu: *tools* presentasi *website* dan kualitas *website*. *Tools* presentasi merupakan gambaran berbagai macam perangkat internet yang dapat dioperasikan pengelolaan *website* pemerintah daerah sehingga *website* menjadi lebih menarik dan lebih mudah diakses. Daftar sub-indeks *tools* presentasi diolah dari penelitian Xiao *et al.*, (2004) dan Marston & Polei (2005). Sub-indeks kualitas *website* menggambarkan kualitas *website* dilihat dari penerapan teknologi dan *user* yang mengakses *website* tersebut. Daftar sub-indeks kualitas *website* diolah dari penelitian Cormier *et al.*, (2008). Total presentasi merupakan penjumlahan rata-rata dari indeks pengungkapan konten dan presentasi pengungkapan *website* pemerintah daerah.

3.1.4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1). Belanja daerah diukur dengan realisasi belanja daerah. Data belanja daerah adalah data tahun 2017 dalam satuan rupiah.

3.1.4.3. Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah adalah sumber daya yang mendukung dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kekayaan daerah diukur dengan total aset. Data kekayaan daerah adalah data tahun 2017 dalam satuan rupiah (Mahsun, 2007).

3.1.4.4. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Per Kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu daerah. Pendapatan Per Kapita diperoleh dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Data Pendapatan Per Kapita adalah data tahun 2017 dalam satuan rupiah (Hudoyo & Mahmud, 2014).

3.1.4.5. *Leverage*

Leverage merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. *Leverage* dilihat dari sisi pemerintah merupakan tambahan dana baru, sehingga dapat membantu perkembangan daerahnya dan dapat mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat. *Leverage* diukur dengan *debt to equity ratio*. *Debt to equity ratio* diperoleh dari *total debt* (hutang) dibagi dengan *equity* (modal). Data *Leverage* adalah data tahun 2017 dalam satuan rupiah (Hudoyo & Mahmud, 2014).

3.1.4.6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Mahsun, 2007). Data Asli Daerah (PAD) adalah data tahun 2017 dalam satuan rupiah.

3.2. Metode Analisis Data

3.2.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel belanja daerah, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, *leverage*, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah melalui internet. Analisis regresi linier berganda dengan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut (Gujarati, 2009):

$$Y = b_0 + b_1 \text{Ln}X_1 + b_2 \text{Ln}X_2 + b_3 \text{Ln}X_3 + b_4 \text{Ln}X_4 + b_5 \text{Ln}X_5 + e_i$$

Dimana :

Y = Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet

X₁ = Belanja Daerah

X₂ = Kekayaan Daerah

X₃ = Pendapatan Per Kapita

X₄ = *Leverage*

X₅ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b₀ = Konstanta

b₁₋₅ = Koefisien Regresi

Ln = Logaritma Natural (persen)

e_i = *Error Term*

Data Logaritma Natural (Ln) adalah perubahan data dari satuan besar, misalnya milyar rupiah menjadi satuan yang kecil (persen). Tujuannya adalah untuk

menyamakan dengan satuan data variabel dependen (Y) Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet yang mana satuannya skor total maksimal 10. Penyamaan satuan data ini juga untuk memperbaiki hasil regresi, penghindaran penyakit asumsi klasik, dan untuk perubahan absolute koefisien variabel dependen (Y) akibat dari perubahan variabel independen (X) (Gujarati, 2009).

3.2.2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam **model regresi** variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2001). Untuk menguji normalitas, dapat menganalisis dengan melihat nilai probabilitasnya. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana salah satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Salah satu asumsi regresi linier klasik adalah tidak adanya multikolinearitas sempurna (*no perfect multikolinearitas*). Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas apabila terjadi korelasi linier yang *perfect* atau *exact* di antara beberapa atau semua variabel bebas. Akibatnya akan sulit untuk melihat pengaruh secara individu variabel bebas terhadap variabel tak bebas (Madalla, 1999). Pendeteksian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode VIF.

Kriteria pengujian :

Jika $VIF > 10$, maka H_0 ditolak

Jika $VIF < 10$, maka H_0 diterima

c. Uji Heteroskedastisitas

Homoskedastisitas adalah situasi dimana varian (σ^2) dari faktor pengganggu atau *disturbance term* adalah sama untuk semua observasi X. Penyimpangan terhadap asumsi ini yaitu disebut heteroskedastisitas yaitu apabila nilai varian (σ^2) variabel tak bebas (Y_i) meningkat sebagai akibat dari meningkatnya varian dari variabel bebas (X_i), maka varian dari Y_i tidak sama (Insukindro, 2001). Pendeteksian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Glejser*. Caranya dengan melihat nilai probabilitas $> 0,05$, sehingga tidak terkena heteroskedastisitas (Ghozali, 2001).

3.2.3. Pengujian Pengaruh Secara Parsial dengan Uji t (*t-test*)

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dengan asumsi bahwa variabel yang lain tetap atau konstan. Adapun langkah-langkah dalam uji t adalah (Sugiyono, 2017):

a. Merumuskan hipotesis

$H_0 : b_i = 0$ (Variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen)

$H_a : b_i \neq 0$ (Variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen)

b. Menentukan kriteria pengujian

Penelitian ini menggunakan *level of significant* (α) 5 %.

- Bila **probabilitas** $t_{\text{-statistik}} \leq \text{Level of Significant} = 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen
- Bila **probabilitas** $t_{\text{-statistik}} > \text{Level of Significant} = 0,05$, maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

c) Mencari nilai $t_{\text{-statistik}}$ (Gujarati, 2009):

$$t\text{-hitung} = \frac{\beta_i}{\text{Se } \beta_i}$$

Keterangan:

t = Nilai $t_{\text{-statistik}}$

β_i = Koefisien regresi

$\text{Se } \beta_i$ = Standart error β_i

3.2.4. Pengujian Pengaruh Secara Bersama-sama dengan Uji F (*F-test*)

Uji F adalah uji serempak yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam uji F adalah (Santoso, 2017):

a. Merumuskan hipotesis :

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = 0$ (Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan).

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_5 \neq 0$ (Ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan).

b. Menentukan kriteria pengujian

Penelitian ini menggunakan *level of significant* (α) 5 %.

- Bila **probabilitas F-statistik** \leq *Level of Significant* = 0,05, maka Ho di tolak, artinya secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Bila **probabilitas F-statistik** $>$ *Level of Significant* = 0,05, maka Ho di terima, artinya secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Mencari F-statistik (Gujarati, 2009).

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah observasi (sampel)

3.2.5. R^2 (Koefisien Determinasi)

R^2 (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 (Koefisien Determinasi) mempunyai *range* antara 0-1. Semakin besar R^2 mengindikasikan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel independen. Perumusan yang digunakan untuk mencari nilai R^2 adalah: (Gujarati, 2009).

$$R^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_i - Y)^2}{\sum (Y_i - Y)^2} = \frac{ESS}{TSS} = \frac{\sum y_i^2}{\sum y_i^2} = \frac{\beta_1^2 \sum x_i^2}{\sum y_i^2} = \beta_1^2 \left(\frac{\sum x_i^2}{\sum y_i^2} \right)$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

X_i = Variabel independen

Y_i = Variabel dependen.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tahap-tahap dan pengolahan data yang kemudian akan dianalisis tentang “Determinan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kab./Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Melalui Internet”. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* Pemerintah Kab./Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah. Laporan keuangan Pemerintah Kab./Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2017, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kab./Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah.

Penarikan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara acak, tetapi dengan menggunakan pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti yaitu Pemerintah Kab./Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah. Berikut ini kriteria pemilihan sampel penelitian:

Tabel 4.1
Prosedur Penarikan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Pemerintah Kab./Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah	40
2	Pemerintah Kab./Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah dan Jawa Tengah yang tidak memiliki <i>website</i>	(0)
3	Jumlah sampel	40
4	Jumlah observasi (40 x 1 tahun)	40

Berikut ini data dan sampel daerah dalam penelitian ini:

Tabel 4.2
Data dan Sampel Daerah Penelitian

No.	Kab./Kota	Belanja Daerah (dalam ribuan)	Ln X1	Kekayaan Daerah (dalam ribuan)	Ln X2	PDRB Per Kapita	Ln X3	Leverage	PAD (dalam ribuan)	Ln X5	Skor Penyajian Internet
1	Kab. Bantul	2.223.664.634	21,52	2.077.645.142	21,45	21,3	3,06	0,834334	1.077.545.041	20,80	100
2	Kab. Gunungkidul	1.758.138.712	21,29	1.739.998.499	21,28	20,7	3,03	0,189682	1.639.988.489	21,22	70
3	Kab. Kulon Progo	1.477.684.839	21,11	1.428.564.823	21,08	20,0	2,99	0,266759	1.328.554.813	21,01	90
4	Kab. Sleman	2.498.770.229	21,64	2.356.293.841	21,58	31,3	3,44	0,742981	1.356.193.741	21,03	100
5	Kota Yogyakarta	2.125.780.332	21,48	2.031.753.682	21,43	69,2	4,24	0,955768	1.031.653.581	20,75	100
6	Kab. Banjarnegara	2.180.266.623	21,50	2.084.204.924	21,46	14,2	2,66	0,255940	1.084.104.823	20,80	80
7	Kab. Banyumas	2.234.752.914	21,53	2.136.656.166	21,48	20,0	3,00	0,956104	1.136.556.065	20,85	60
8	Kab. Batang	2.289.239.205	21,55	2.189.107.408	21,51	17,3	2,85	0,35626	1.189.007.307	20,90	50
9	Kab. Blora	2.343.725.496	21,58	2.241.558.650	21,53	18,6	2,92	0,956408	1.241.458.549	20,94	100
10	Kab. Boyolali	2.398.211.788	21,60	2.294.009.892	21,55	19,7	2,98	0,256550	1.293.909.791	20,98	80
11	Kab. Brebes	2.452.698.079	21,62	2.346.461.134	21,58	15,6	2,75	0,956686	1.346.361.033	21,02	70
12	Kab. Cilacap	2.507.184.370	21,64	2.398.912.376	21,60	54,5	4,00	0,256815	1.398.812.275	21,06	80
13	Kab. Demak	2.561.670.661	21,66	2.451.363.618	21,62	13,9	2,63	0,156939	1.451.263.517	21,10	60
14	Kab. Grobogan	2.616.156.952	21,68	2.503.814.860	21,64	12,3	2,51	0,957058	1.503.714.759	21,13	80
15	Kab. Jepara	2.670.643.244	21,71	2.556.266.103	21,66	15,0	2,71	0,157172	1.556.166.002	21,17	80
16	Kab. Karanganyar	2.725.129.535	21,73	2.608.717.345	21,68	26,0	3,26	0,157282	1.608.617.244	21,20	50
17	Kab. Kebumen	2.779.615.826	21,75	2.661.168.587	21,70	14,2	2,66	0,957387	1.661.068.486	21,23	90
18	Kab. Kendal	2.834.102.117	21,76	2.713.619.829	21,72	27,5	3,32	0,957488	1.713.519.728	21,26	70
19	Kab. Klaten	2.888.588.408	21,78	2.766.071.071	21,74	20,4	3,02	0,357586	1.765.970.970	21,29	100
20	Kab. Kudus	2.943.074.700	21,80	2.818.522.313	21,76	79,2	4,37	0,91768	1.818.422.212	21,32	100
21	Kab. Magelang	2.997.560.991	21,82	2.870.973.555	21,78	15,8	2,76	0,75777	1.870.873.454	21,35	90
22	Kab. Pati	3.052.047.282	21,84	2.923.424.797	21,80	21,0	3,04	0,957857	1.923.324.696	21,38	60
23	Kab. Pekalongan	3.106.533.573	21,86	2.975.876.039	21,81	15,8	2,76	0,857941	1.975.775.938	21,40	70
24	Kab. Pemasang	3.161.019.864	21,87	3.028.327.281	21,83	12,0	2,48	0,958022	2.028.227.180	21,43	70
25	Kab. Purbalingga	3.215.506.156	21,89	3.080.778.524	21,85	16,3	2,79	0,858101	2.080.678.423	21,46	70
26	Kab. Purworejo	3.269.992.447	21,91	3.133.229.766	21,87	16,0	2,77	0,138176	2.133.129.665	21,48	70
27	Kab. Rembang	3.324.478.738	21,92	3.185.681.008	21,88	18,3	2,91	0,95825	2.185.580.907	21,51	70
28	Kab. Semarang	3.378.965.029	21,94	3.238.132.250	21,90	29,9	3,40	0,258321	2.238.032.149	21,53	60
29	Kab. Sragen	3.433.451.320	21,96	3.290.583.492	21,91	25,6	3,24	0,958389	2.290.483.391	21,55	60
30	Kab. Sukoharjo	3.487.937.612	21,97	3.343.034.734	21,93	26,2	3,27	0,228456	2.342.934.633	21,57	70
31	Kab. Tegal	3.542.423.903	21,99	3.395.485.976	21,95	14,9	2,70	0,658521	2.395.385.875	21,60	90
32	Kab. Temanggung	3.596.910.194	22,00	3.447.937.218	21,96	17,4	2,86	0,758583	2.447.837.117	21,62	70
33	Kab. Wonogiri	3.651.396.485	22,02	3.500.388.460	21,98	18,8	2,93	0,958644	2.500.288.359	21,64	80
34	Kab. Wonosobo	3.705.882.776	22,03	3.552.839.702	21,99	15,3	2,73	0,858703	2.552.739.601	21,66	70
35	Kota Magelang	3.760.369.068	22,05	3.605.290.945	22,01	45,6	3,82	0,858760	2.605.190.844	21,68	100
36	Kota Pekalongan	3.814.855.359	22,06	3.657.742.187	22,02	21,3	3,06	0,958815	2.657.642.086	21,70	50
37	Kota Salatiga	3.869.341.650	22,08	3.710.193.429	22,03	43,8	3,78	0,658869	2.710.093.328	21,72	100
38	Kota Semarang	3.923.827.941	22,09	3.762.644.671	22,05	66,7	4,20	0,758922	2.762.544.570	21,74	100

39	Kota Surakarta	3.978.314.232	22,10	3.815.095.913	22,06	58,3	4,07	0,758973	2.814.995.812	21,76	100
40	Kota Tegal	4.032.800.524	22,12	3.867.547.155	22,08	38,2	3,64	0,959023	2.867.447.054	21,78	70

4.1. Analisis Data

4.1.1. Analisis Deskriptif

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	SD
Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y)	40	50	100	78,25	16,154
Belanja Daerah (X1)	40	21,11	22,12	21,7863	0,23424
Kekayaan Daerah (X2)	40	21,08	22,08	21,7435	0,23387
Pendapatan Per Kapita (X3)	40	2,48	4,37	3,1403	0,50712
Leverage (X4)	40	0,13818	0,95902	0,6680494	0,31879782
Pendapatan Asli Daerah (X5)	40	20,75	21,78	21,3155	0,30675

Sumber: Hasil Olah Data Statistik Deskriptif, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

- Rata-rata Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) sebesar 78,25, nilai minimum sebesar 50, nilai maksimum sebesar 100, dan standar deviasi sebesar 16,154 dengan jumlah observasi (n) sebesar 40. Nilai rata-rata Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) cukup mendekati nilai standar deviasi sebesar 16,154, dengan demikian penyimpangan data Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) cukup rendah.
- Rata-rata Belanja Daerah (X1) sebesar 21,7863, nilai minimum sebesar 21,11, nilai maksimum sebesar 22,12, dan standar deviasi sebesar 0,23424 dengan jumlah observasi (n) sebesar 40. Nilai rata-rata Belanja Daerah (X1) cukup mendekati nilai standar deviasi sebesar 0,23424, dengan demikian penyimpangan data Belanja Daerah (X1) cukup rendah.
- Rata-rata Kekayaan Daerah (X2) sebesar 21,7435, nilai minimum sebesar 21,08, nilai maksimum sebesar 22,08, dan standar deviasi sebesar 0,23387 dengan

jumlah observasi (n) sebesar 40. Nilai rata-rata Kekayaan Daerah (X_2) cukup mendekati nilai standar deviasi sebesar 0,23387, dengan demikian penyimpangan data Kekayaan Daerah (X_2) cukup rendah.

- Rata-rata Pendapatan Per Kapita (X_3) sebesar 3,1403, nilai minimum sebesar 2,48, nilai maksimum sebesar 4,37, dan standar deviasi sebesar 0,50712 dengan jumlah observasi (n) sebesar 40. Nilai rata-rata Pendapatan Per Kapita (X_3) mendekati nilai standar deviasi sebesar 0,50712, dengan demikian penyimpangan data Pendapatan Per Kapita (X_3) rendah.

- Rata-rata *Leverage* (X_4) sebesar 0,6680494, nilai minimum sebesar 0,13818, nilai maksimum sebesar 0,95902, dan standar deviasi sebesar 0,31879782 dengan jumlah observasi (n) sebesar 40. Nilai rata-rata *Leverage* (X_4) mendekati nilai standar deviasi sebesar 0,31879782, dengan demikian penyimpangan data *Leverage* (X_4) rendah.

- Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (X_5) sebesar 21,3155, nilai minimum sebesar 20,75, nilai maksimum sebesar 21,78, dan standar deviasi sebesar 0,30675 dengan jumlah observasi (n) sebesar 40. Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah (X_5) cukup mendekati nilai standar deviasi sebesar 0,30675, dengan demikian penyimpangan data Pendapatan Asli Daerah (X_5) cukup rendah.

4.1.2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal

(Ghozali, 401). Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas (Sig.) > 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test* sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test*

Variabel	Sig.	Nilai Kritis	Keterangan
Residual	0,996	0,05	Normalitas

Sumber: Lampiran Hasil Uji Normalitas, 2018.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test* di atas terlihat bahwa nilai probabilitas = 0,104 > 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana salah satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Salah satu asumsi regresi linier klasik adalah tidak adanya multikolinearitas sempurna (*no perfect multikolinearitas*).

Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas apabila terjadi hubungan linier yang *perfect* atau *exact* diantara beberapa atau semua variabel bebas. Akibatnya akan sulit untuk melihat pengaruh secara individu variabel bebas terhadap variabel tak bebas (Madalla, 1999). Pendeteksian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode VIF.

Kriteria pengujian :

Jika $VIF > 10$, maka H_0 ditolak

Jika $VIF < 10$, maka H_0 diterima

Hasil uji multikolinieritas dengan metode VIF sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinearitas dengan Metode VIF

Variabel	VIF	Nilai Kritis	Keterangan
X ₁	1,057	10	Tidak terjadi multikolinearitas
X ₂	1,621	10	Tidak terjadi multikolinearitas
X ₃	1,487	10	Tidak terjadi multikolinearitas
X ₄	1,250	10	Tidak terjadi multikolinearitas
X ₅	4,500	10	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Uji VIF, 2018.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF, nilai VIF < 10, artinya bahwa semua variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas, sehingga tidak membiaskan interpretasi hasil analisis regresi.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana faktor pengganggu (*error term*) pada periode tertentu berkorelasi dengan faktor pengganggu pada periode lain. Faktor pengganggu tidak random (*unrandom*). Autokorelasi disebabkan oleh faktor-faktor kelembaman (inersial), manipulasi data, kesalahan dalam menentukan model (*bias spesification*), adanya fenomena sarang laba-laba, dan penggunaan lag dalam model. Pendeteksian asumsi autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Durbin-Watson*.

Kriteria pegujian :

Jika $d\text{-hitung} < dL$ atau $d\text{-hitung} > (4-dL)$, H_0 ditolak, berarti ada autokorelasi

Jika $dL < d\text{-hitung} < (4 - dL)$, H_0 diterima, berarti tidak terjadi autokorelasi

Jika $dL < d\text{-hitung} < dU$ atau $(4-dU) < d\text{-hitung} < (4-dL)$, maka tidak dapat disimpulkan ada tidaknya autokoelasi.

Dari hasil regresi diperoleh nilai $D-W_{\text{statistik}}$ sebesar 1,921. Dengan $n = 40$, $k = 5$, dan taraf nyata (α) 5 %, maka nilai $dL = 1,707$, $dU = 1,831$, sehingga $(4-dU) = 4-1,831 = 2,169$ dan $(4-dL) = 4-1,707 = 2,293$.

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Tingkat Autokorelasi (DW)	Jenis Autokorelasi
$(4 -DW.L) < DW < 4$	Ada Autokorelasi negatif
$(4 -DW.U) < DW < (4 -DW.L)$	Tanpa kesimpulan
$1,776 < 1,921 < (2,224)$	Tidak Ada Autokorelasi
$DW.L < DW < DW.U$	Tanpa Kesimpulan
$0 < DW < DW.L$	Ada Autokorelasi positif

Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Durbin Watson, 2018.

Ternyata nilai $D-W_{\text{statistik}}$ sebesar 1,921 berada di daerah penerimaan H_0 . Hal ini berarti model yang diestimasi tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Homoskedastisitas adalah situasi dimana varian (σ^2) dari faktor pengganggu atau *disturbance term* adalah sama untuk semua observasi X. Penyimpangan terhadap asumsi ini yaitu disebut heteroskedastisitas yaitu apabila nilai varian (σ^2) variabel tak bebas (Y_i) meningkat sebagai akibat dari meningkatnya varian dari variabel bebas (X_i), maka varian dari Y_i tidak sama (Insukindro, 2003). Pendeteksian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Glejser*. Caranya dengan melihat nilai probabilitas $> 0,05$, sehingga tidak terkena heteroskedastisitas (Ghozali, 2001).

Hasil uji heteroskedastisitas dengan *Glejser* sbb :

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan *Glejser*

Variabel	Sig.	Nilai Kritis	Keterangan
X ₁	0,818	0,05	Homoskedastisitas
X ₂	0,081	0,05	Homoskedastisitas
X ₃	0,304	0,05	Homoskedastisitas
X ₄	0,899	0,05	Homoskedastisitas
X ₅	0,925	0,05	Homoskedastisitas

Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Uji Heteroskedastisitas, 2018.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Glejser* terlihat bahwa nilai probabilitas $> 0,05$. Hal ini berarti model yang diestimasi bebas dari heteroskedastisitas.

4.1.3. Uji Statistik

a. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Belanja Daerah (X₁), Kekayaan Daerah (X₂), Pendapatan Per Kapita (X₃), *Leverage* (X₄), dan Pendapatan Asli Daerah (X₅) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik komputer *SPSS for Windows* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Regresi Linier Berganda Metode OLS

Variabel	Koefisien Regresi	Standart Error	t-statistik	Sig.
Konstanta	-1938,445	249,981	-7,754	0,000
X ₁	40,894	11,260	3,632	0,001
X ₂	37,909	8,650	4,383	0,000
X ₃	3,955	5,403	0,732	0,469
X ₄	-15,377	6,815	-2,256	0,031

X ₅	14,044	6,237	2,252	0,031
R²	: 0,950			
Adj. R²	: 0,942			
F-statistik	: 128,659, Sig = 0,020.			
DW-statistik	: 1,921			
N	: 40			
Variabel Dependen (Y): Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet				

Sumber: Hasil Olah Data Regresi Linier Berganda, 2018.

Secara matematis hasil dari analisis regresi linier berganda tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = -1938,445 + 40,894X_1 + 37,909X_2 + 3,955X_3 - 15,377X_4 + 14,044X_5$$

Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah:

1) $b_0 = -1938,445$

Artinya, apabila Belanja Daerah (X₁), Kekayaan Daerah (X₂), Pendapatan Per Kapita (X₃), *Leverage* (X₄), dan Pendapatan Asli Daerah (X₅) sama dengan nol, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) sebesar 1938,445 persen.

2) $b_1 = 40,894$

Artinya apabila peningkatan Belanja Daerah (X₁) sebesar 1 persen, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) naik sebesar 40,894 persen dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*).

3) $b_2 = 37,909$

Artinya apabila peningkatan Kekayaan Daerah (X₂) sebesar 1 persen, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) naik sebesar 37,909 persen dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*).

4) $b_3 = 3,955$

Artinya apabila kenaikan Pendapatan Per Kapita (X3) sebesar 1, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) naik sebesar 3,955 persen dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*).

5) $b_4 = -15,377$

Artinya apabila penurunan *Leverage* (X4) sebesar 1 rupiah, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) naik sebesar 15,377 persen dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*).

6) $b_5 = 14,044$

Artinya apabila kenaikan Pendapatan Asli Daerah (X5) sebesar 1 persen, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) naik sebesar 14,044 persen dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*).

b. Uji t (Pengujian Hipotesis)

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel Belanja Daerah (X1), Kekayaan Daerah (X2), Pendapatan Per Kapita (X3), *Leverage* (X4), dan Pendapatan Asli Daerah (X5) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) secara individual (uji t) dengan asumsi bahwa variabel yang lain tetap atau konstan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik komputer *SPSS for Windows* diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Pengujian Pengaruh Belanja Daerah (X1) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y)

H_1 : Belanja Daerah (X1) berpengaruh positif terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y).

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig. = 0,001 < *Level of Significant* = 0,05, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Belanja

Daerah (X1) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y).

2) Pengujian Pengaruh Kekayaan Daerah (X2) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y)

H₂: Kekayaan Daerah (X2) berpengaruh negatif terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y).

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig. = 0,000 < *Level of Significant* = 0,05, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Kekayaan Daerah (X2) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y).

3) Pengujian Pengaruh Pendapatan Per Kapita (X3) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y)

H₃: Pendapatan Per Kapita (X3) berpengaruh positif terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y).

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig. = 0,469 > *Level of Significant* = 0,05, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh positif, tetapi tidak signifikan antara Pendapatan Per Kapita (X3) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y).

4) Pengujian Pengaruh *Leverage* (X4) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y)

H₄: *Leverage* (X4) berpengaruh negatif terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y).

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig. = 0,031 < *Level of Significant* = 0,05, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara

Leverage (X4) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y).

5) Pengujian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X5) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y)

H₅: Pendapatan Asli Daerah (X5) berpengaruh positif terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y).

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig. = 0,031 < *Level of Significant* = 0,05, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (X5) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y).

c. Uji F

Uji F adalah uji simultan yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Belanja Daerah (X1), Kekayaan Daerah (X2), Pendapatan Per Kapita (X3), *Leverage* (X4), dan Pendapatan Asli Daerah (X5) secara bersama-sama terhadap terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y).

Diperoleh nilai sig. = 0,000 < *Level of Significant* = 0,05, maka H₀ ditolak atau H_a diterima, artinya ada pengaruh secara bersama-sama variabel Belanja Daerah (X1), Kekayaan Daerah (X2), Pendapatan Per Kapita (X3), *Leverage* (X4), dan Pendapatan Asli Daerah (X5) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y).

d. Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Hasil dari regresi dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) diperoleh R² (Koefisien Determinasi) sebesar 0,950, artinya variabel dependen (Y) dalam model yaitu Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) dijelaskan oleh

variabel independen yaitu variabel Belanja Daerah (X1), Kekayaan Daerah (X2), Pendapatan Per Kapita (X3), *Leverage* (X4), dan Pendapatan Asli Daerah (X5) sebesar 95,0%, sedangkan sisanya sebesar 5,0% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Belanja Daerah (X1) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Belanja Daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y). Hal ini berarti, jika Belanja Daerah (X1) mengalami peningkatan, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) juga akan mengalami peningkatan. Menurut Undang-Undang No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah terbagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja daerah, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah (Pratama dkk., 2015). Pengadaan infrastruktur atau sarana prasarana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tiap tahunnya, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas

umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tingginya belanja daerah, pemerintah daerah seharusnya memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat (Puspita & Dwi, 2012; Ratmono, 2013).

4.2.2. Pengaruh Kekayaan Daerah (X2) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Kekayaan Daerah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y). Hal ini berarti, jika Kekayaan Daerah (X2) mengalami peningkatan, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) akan mengalami peningkatan. Tingkat kemakmuran suatu daerah dapat tergambarkan dari kekayaan daerah tersebut. Kekayaan daerah yang tinggi merupakan indikator kesuksesan suatu pemerintahan dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya, serta kesuksesan dalam hal mengelola keuangan. Kekayaan daerah adalah sumber daya yang mendukung dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kekayaan yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan. Hal inilah yang mendorong masyarakat selaku prinsipal menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menuntut transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dan memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat. Melalui publikasi laporan keuangan, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi keuangan secara lebih lengkap dengan biaya yang murah sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat (Sinaga, 2011). Pemerintah daerah yang mempunyai kekayaan yang besar, akan menunjukkan kinerjanya yang baik atas

pengelolaan sumberdaya dan potensi daerahnya, serta semakin banyak informasi yang harus diungkapkan atas pertanggungjawaban kekayaan daerahnya yang besar. Sehingga pemda akan semakin banyak mempublikasikan laporan keuangannya di internet. Kekayaan daerah dapat menjadi salah satu daya tarik bagi investor yang akan berinvestasi di daerah tersebut karena mampu memakmurkan daerahnya secara mandiri sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kelangsungan usahanya. Pengaruh ini juga akan bersimultan dengan pendapatan masyarakat di daerah tersebut sehingga makin menggeliatkan perekonomian daerah tersebut. Semakin tinggi kekayaan daerah semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan (Afryansyah & Haryanto, 2011). Hal ini dimaksudkan dengan kekayaan yang tinggi pemerintah akan cenderung ingin memperlihatkan atau menginformasikannya. Rahman, dkk. (2013) membuktikan kekayaan pemda berpengaruh positif terhadap publikasi LKPD melalui internet. Kekayaan pemerintah merupakan bukti nyata atas kinerja pemerintah daerah yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Sehingga semakin besar rasio pengelolaan belanja pemerintah daerah, maka kecenderungan pemerintah daerah untuk melaporkan keuangannya di internet pun juga semakin tinggi, dan juga sebaliknya.

4.2.3. Pengaruh Pendapatan Per Kapita (X3) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Per Kapita (X3) berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y). Hal ini berarti, jika Pendapatan Per Kapita (X3) mengalami peningkatan, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) akan tetap atau konstan. Pendapatan per kapita adalah besarnya

pendapatan rata-rata penduduk disuatu daerah. Banyak sedikitnya jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah pendapatan per kapita suatu daerah. Level ekonomi dalam masyarakat daerah dapat mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan oleh pemerintah daerah. Perekonomian masyarakat setempat dapat mempengaruhi pendapatan per kapita masyarakat dan juga dapat mempengaruhi teknologi yang di adaptasi oleh masyarakat tersebut. Perkembangan teknologi informasi pun semakin pesat, sehingga mendorong pemerintah ikut berperan aktif dalam teknologi tersebut salah satu contohnya yaitu dengan pelaporan keuangan daerah melalui internet. Pemerintah daerah (agen) harus menyesuaikan perkembangan teknologi yang terjadi di lingkungan masyarakat (prinsipal). Dengan penggunaan Internet yang sangat besar kemungkinan besar pemerintah daerah akan melaporkan keuangan daerah melalui *website* pemerintah setempat sehingga transparansi laporan keuangan dapat diketahui oleh masyarakat. Semakin tingginya pendapatan per kapita tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam *website* pemerintah daerah maka dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat setempat (Hudoyo & Mahmud, 2014). Dengan pendapatan per kapita yang tinggi, maka masyarakat lebih memanfaatkan teknologi sehingga kemungkinan pemerintah daerah lebih transparansi dalam melaporkan keuangan.

4.2.4. Pengaruh *Leverage* (X4) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa *Leverage* (X4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y). Hal ini berarti, jika *Leverage* (X4) mengalami penurunan, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) juga akan mengalami peningkatan. *Leverage* dilihat dari sisi pemerintah merupakan tambahan dana baru,

sehingga dapat membantu perkembangannya dan dapat mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat. *Leverage* berhubungan dengan aktiva atau dana dimana pengguna aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap atau beban tetap. Didalam sektor publik, rasio utang atau *leverage* sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya dan untuk bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Teori *Agency* memprediksi bahwa pemerintah daerah dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi. *Leverage* atau pinjaman dari luar dilihat dari sisi pemerintah merupakan tambahan dana baru. Tuntutan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam pemerintahan menjadikan pemerintah daerah lebih terbuka dengan pelaporan. *Leverage* mengindikasikan sejauh mana pemda menggunakan dana yang dipinjam untuk membiayai aset yang dimiliki. Kreditor akan selalu mengawasi kinerja pemda dalam menggunakan dana yang dipinjam dan menilai kemampuan pemda dalam melunasi kewajibannya. *Leverage* yang tinggi membuat pengawasan dan informasi yang dibutuhkan oleh kreditor semakin besar, sehingga pemda menanggung biaya yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan pengawasan oleh kreditor. Internet merupakan media yang paling *cost effective* bagi Pemda dalam mempublikasikan informasi keuangannya. Melalui publikasi laporan keuangan di internet, pemda dapat memberikan informasi pemerintahan secara lebih rinci dengan biaya yang ringan, sehingga dapat memfasilitasi kreditor dalam mengawasi kinerja pemda (Trisnawati & Komarudin, 2014). Semakin tingginya *leverage* tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam *website* pemerintah daerah semakin menurun. Hal ini berarti bahwa

pemerintah membatasi informasi mengenai modal yang didapat dengan maksud ingin membuat masyarakat lebih mandiri.

4.2.5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X5) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y). Hal ini berarti, jika Pendapatan Asli Daerah (X5) mengalami peningkatan, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) juga akan mengalami peningkatan. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah merupakan (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Mahsun, 2007). Pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi akan menunjukkan kepada para *stakeholders*-nya bahwa pemerintah daerah telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Bila disesuaikan dengan hubungan kontraktual antara agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat) dalam konteks pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah yang ditunjang sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor

untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tingginya pendapatan asli daerah akan meningkatkan tingkat pengungkapan dan kualitas informasi pada *website* pemerintah daerah (Puspita & Dwi, 2012). Hal ini dimaksudkan bahwa semakin tingginya pendapatan asli daerah membuat pemerintah ingin memberikan informasi tersebut kepada masyarakat, karena tingginya pendapatan asli daerah menunjukkan kinerja pemerintahan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa Belanja Daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y). Hal ini berarti, jika Belanja Daerah (X1) mengalami peningkatan, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) juga akan mengalami peningkatan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kekayaan Daerah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y). Hal ini berarti, jika Kekayaan Daerah (X2) mengalami peningkatan, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) akan mengalami peningkatan.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Per Kapita (X3) tidak berpengaruh terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y). Hal ini berarti, jika Pendapatan Per Kapita (X3) mengalami peningkatan, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) akan tetap atau konstan.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Leverage* (X4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y). Hal ini berarti, jika *Leverage* (X4) mengalami penurunan, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) juga akan mengalami peningkatan.

5. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y). Hal ini berarti, jika Pendapatan Asli Daerah (X5) mengalami peningkatan, maka Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet (Y) juga akan mengalami peningkatan.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini hanya meneliti dengan objek laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, untuk peneliti selanjutnya disarankan ditambah laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dan Jawa Barat, sehingga memungkinkan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet akan mengalami peningkatan.

5.3. Saran

Penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet dapat mencerminkan semakin tinggi integritas keuangan pemerintah kabupaten/kota, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten/kota membuat isu positif, perbaikan manajemen pemerintahan, yang membuat *website* laporan keuangan yang lebih kompleks dalam rangka meningkatkan kepositifan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, RD., & Haryanto. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3): 1-11.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bonson, E dan Escobar, T. 2005. A Survey on Voluntary Disclosure on the Internet: Empirical Evidence from European Union companies. *The International Journal of Digital Accounting Research*. 2: 27-51.
- Cormier, D., Ledoux, MJ., & Magnan, M. 2009. The Use of Websites as a Disclosure Platform for Corporate Performance. *International of Accounting Information System*. 10(1): 1-24.
- Choiriyah, U. 2010. *Information Gap Pengungkapan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Djaenuri, A. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2009. *Econometric*. Singapura: Mc. Graw Hill Inc.
- Halim, A & S. Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daeah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol.2 (1), hlm. 53-64.
- Hudoyo, YT., & Mahmud A. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*. 3(4): 485-492.
- Hilmi, AZ., & D. Martani. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV*. Banjarmasin. 20-23 September.
- Istikomah & Kurniawati Mutmainah. 2016. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Naskah Publikasi Penelitian*. Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo.
- Kawedar, W., Abdul R., & Sri H. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Buku I*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Khasanah, Nur Lailatul & Shiddiq Nur Rahardjo. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting* 3 (3): 1-11.
- Madalla, GS. 1999. *Introduction to Econometrics, 2nd Edition*, New York.
- Mahsun. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Marston, C., & Polei, A. 2005. Corporate Reporting on The Internet by German Companies. *International Journal of Accounting Information Systems*. 5(3): 285-311.
- Puspita, Rora & Dwi Martani. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Prabowo, Daniel Wicaksono Adhi. 2016. Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD114) Melalui Internet (IFLGR) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis MEDIA EKONOMI*. Volume XVI, No.1.
- Pratama, KAD., Werastuti, DNS., & Sujana, E. 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah*. 3(1): 1-12.
- Rahman, P. Aditya, Sutaryo & Agus Budiarmanto. 2013. Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*.
- Ratmono, D. 2013. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi*. 1(2): 28-48.
- Rosita, S. Ladya Risqa Ayu & Johan Arifin. 2017. Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember*.
- Santoso, Singgih. 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Scott, WR. 2009. *Financial Accounting Theory*. Toronto: Pearson Prentice Hall.
- Setyowati, Lilis. 2016. Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Volume 6 (1). P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN: 2461-1182. Hal. 45-62.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Sinaga, YF. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah. *Skripsi*. FEB UNDIP Semarang.
- Todaro, Michael P. 2003. *Ekonomi Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Trisnawati, Mya Dewi & Komarudin Achmad. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Naskah Publikasi Penelitian*. Universitas Brawijaya.
- Xiao, JZ., Yang, H., & Chouw, CW. 2004. The Determinants and Characteristics of Voluntary Internet-based disclosures by listed Chinese Companies. *Journal of Accounting and Public Policy*. 23(3): 191-225.
- World Bank, The Dark Side of E-Government, <http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/darksideofe-gov.pdf>, 2003.
- Zulhilmi, Amiruddin & Dwi Martani. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Universitas Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.